



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI –PARLEMEN TIONGKOK**

Tahun Sidang	:	2020 – 2021
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Koordinasi (Virtual)
Dengan	:	Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Jumat, 27 November 2020
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI Gedung Nusantara III, Lt. VI
Acara	:	1. <i>Virtual Meeting</i> dalam rangka membahas perkembangan hubungan bilateral Indonesia-RRT; 2. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	Puteri Anetta Komarudin, B.Com (A-295/ F.PG)
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Set. KSB)
Hadir Pihak DPR	:	1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep (A-182/ F.PDIP); 2. Dr. Dewi Aryani, M.Si (A-200/ F.PDIP); 3. Daniel Johan, SE (A-54/F.PKB) 4. Sekretariat KSB BKSAP
Kementerian Luar Negeri	:	1. Santo Darmosumarto – Direktur Astimpas Kemenlu RI 2. Dino R. Kusnadi – Wakil Dubes RI di Beijing 3. Ibu Rukmini Tri Setiati, Koordinator Fungsi Politik KBRI Beijing 4. Virdiana Ririen, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Beijing 5. Nugrahadi H. Yuwono, Sekretaris Pertama Fungsi Politik KBRI Beijing 6. Khrisna P. Laurensius, Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi KBRI Beijing

I. PENDAHULUAN

Puteri Anetta Komarudin, B.Com (A-295/ F.PG), mengadakan pertemuan secara virtual dengan Direktur Astimpas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Beijing. Pertemuan ini dibuka pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Ketua GKSB DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini diharapkan bisa mendapatkan bahan masukan beserta pending matters terkait hubungan RI – Tiongkok, karena GKSB DPR RI akan mengadakan pembicaraan dengan Parlemen Tiongkok dalam

waktu dekat.

2. Terkait dengan beberapa pertanyaan dari GKSB DPR RI yang telah disampaikan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri memberi tanggapan sebagai berikut :
 - Terkait sustainable relationship antara Indonesia- RRT, disarankan agar ada kegiatan yang berkelanjutan setelah kunjungan DPR RI ke RRT. Informasi yang diperoleh dari kunjungan GKSB ke Tiongkok hendaknya harus kembali kepada rakyat di Indonesia, dan apabila memungkinkan ada feedback dari masyarakat yang nantinya bisa ditanyakan kepada pihak Tiongkok. Untuk itu kemitraan antara GKSB DPR RI dengan Parlemen Tiongkok dapat lebih meningkat dan luas.
 - Terkait isu strategis yang bisa menjadi bahan perbincangan antara DPR RI dan parlemen Tiongkok antara lain di bidang kesehatan, industri farmasi, obat-obatan tradisional, maupun investasi di bidang industri farmasi, pemberian CSR dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Indonesia agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar serta potensi kerjasama komunitas muslim kedua negara.
 - Terkait dengan isu sensitif, seperti isu Uighur, Laut Tiongkok Selatan maupun Hongkong/Taiwan, disarankan tidak perlu diangkat dalam pembahasan apabila pihak mereka tidak mengangkatnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun Indonesia menerapkan kebijakan “*One China Policy*” dimana kita mengakui kedaulatan RRT, dan permasalahan-permasalahan dalam negeri mereka tidak perlu kita angkat dalam diskusi.
 - Terkait Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut ASEAN menjadi katalisator di kawasan Asia Pasifik dan membuat kerjasama ekonomi menjadi lebih dekat.
 - Terkait pertumbuhan ekonomi di RRT di tengah pandemi, dimana pertumbuhannya mencapai 4,9 persen pada kuartal ketiga 2020, disampaikan bahwa dengan adanya pandemi covid, hubungan perdagangan Indonesia – RRT tetap berjalan, dan RRT tetap menjadi negara tujuan ekspor Indonesia.
 - Terkait dengan penanganan covid 19, dan perjanjian khusus terkait pemulihan ekonomi nasional, disampaikan bahwa saat ini penerbangan ke RRT telah dibuka kembali, sehingga apabila dimungkinkan apabila ada keinginan untuk berkunjung ke RRT.
 - Terkait dengan defisit perdagangan RI – RRT dan sulitnya produk UMKM Indonesia menembus pasar RRT, disampaikan bahwa selama ini yang menjadi permasalahan dari sulitnya produk UMKM Indonesia masuk adalah karena tidak adanya sustainability/kontinuitas dari produk UMKM Indonesia. Sehingga tidak dapat menyerap banyak pesanan/order, UMKM Indonesia masih terbatas produksinya sehingga tidak dapat memenuhi permintaan RRT.
 - Terkait dengan produk-produk unggulan ekspor Indonesia ke RRT, selain kelapa sawit, sarang burung walet, buah tropis maupun produk perikanan, juga buah-buahan seperti manggis, salak, buah naga.
 - Terkait dengan kesepakatan Bank Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok (PBC) untuk kerjasama penggunaan mata uang lokal, hal tersebut

- bertujuan untuk membuat kedua mata uang lokal semakin menguat dan mengurangi ketergantungan dengan mata uang US Dollar.
- Terkait dengan inisiatif Belt and Road (BRI) dan Koridor Ekonomi Komprehensif antara RI dan RRT, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra yang sangat penting sehingga diharapkan di masa yang akan datang kerjasama dalam berbagai bidang antara RI dan RRT akan terus meningkat.
 - Hubungan antara RI dan Tiongkok diharapkan tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga business to business dan people to people.
3. Hal lainnya yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut yang bisa menjadi bahan pembicaraan antara RI dengan RRT antara lain :
- Terkait dengan kerjasama di bidang pendidikan, khususnya untuk pengembangan SDM di bidang kesehatan,
 - Kerjasama dibidang tenaga kerja, diharapkan adanya transparansi untuk rekrutmen Tenaga Kerja di RRT maupun di Indonesia, baik untuk sektor formal maupun informal.
 - Pengembangan kerjasama di bidang pertanian, "traditional chinese medicine", maupun update perkembangan vaksin yang telah mencapai tahap uji klinis ketiga.
 - Penyedia jasa keuangan di Tiongkok, dimana industri ini sangat sulit untuk masuk ke Tiongkok, padahal Indonesia sangat terbuka untuk menerima investasi dalam hal tersebut, diharapkan pihak RRT juga bisa membuka diri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 27 November 2020

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,



Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.

NIP. 197206221999032001